

## **Analisis Kebijakan Program Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat**

**Risa Arisanti<sup>1\*</sup>, Sofyan Sauri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

[risa.arisanti@uika-bogor.ac.id](mailto:risa.arisanti@uika-bogor.ac.id)<sup>1</sup>, [sofyansauri@upi.edu](mailto:sofyansauri@upi.edu)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*Education is a shared responsibility between schools, families, communities and governments. Facing challenges in the world of education in the future, it takes the support of parents and the community in achieving educational goals. This study analyzes Education policies to increase parental and community participation, using qualitative methods with library research. The results of the study indicate that currently the participation of the community in education has been stated in various government policies, but in its implementation the participation of parents and the community is still not optimal. So that in its implementation, further policy efforts are needed from the school to increase the role of parents and the community. Efforts to increase the role of parents and the community through school committees need to be realized in School-Based Management: (1) building school ownership attitudes, (2) formulating school policies, (3) building quality awareness, (4) attention to academic life, and (5) build school institutional work arrangements. Related to the purpose of education to form the character of students who have noble character, it is necessary to have good cooperation and coordination between the school, parents and the community in the success of value-based education. The school must integrate the content of the value curriculum in each lesson. There is good cooperation with parents in education that is in line in the family. Value education in society provides children with an understanding of the implementation of value education in society.*

**Keywords : policy, participation, parent, education**

### **ABSTRAK**

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menghadapi tantangan di dunia pendidikan di masa yang akan datang, dibutuhkan dukungan orang tua dan masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan. Penelitian ini menganalisis kebijakan Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat, menggunakan metode kualitatif dengan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini peran serta masyarakat dalam pendidikan sudah dituangkan dalam berbagai

kebijakan pemerintah, namun dalam implementasinya partisipasi orang tua dan masyarakat masih belum optimal. Sehingga pada implementasinya, diperlukan upaya kebijakan lebih lanjut dari pihak sekolah untuk meningkatkan peran orang tua dan masyarakat. Upaya peningkatan peran orang tua dan masyarakat melalui komite sekolah perlu diwujudkan dalam Manajemen Berbasis Sekolah: (1) membangun sikap kepemilikan sekolah, (2) merumuskan kebijakan sekolah, (3) membangun kesadaran mutu, (4) perhatian terhadap kehidupan akademik, dan (5) membangun tata kerja kelembagaan sekolah. Terkait dengan tujuan pendidikan terbentuknya karakter peserta didik yang berakhlak mulia, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat dalam menyukseskan pendidikan berbasis nilai. Pihak sekolah harus mengintegrasikan muatan kurikulum nilai dalam setiap pelajaran. Adanya kerjasama yang baik dengan orang tua dalam pendidikan yang sejalan di keluarga. Pendidikan nilai dalam masyarakat memberikan pemahaman kepada anak akan implementasi pendidikan nilai di masyarakat.

***Kata kunci : kebijakan, partisipasi, pendidikan, orang tua, masyarakat***

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan sejak masa kemerdekaan. Kebijakan kurikulum pendidikan sudah banyak sekali berubah, di antaranya kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan terakhir 2013. Perubahan tersebut merupakan akibat dari adanya perubahan sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara cepat, cermat, dan cerdas harus direspon. Pengembangan dan perubahan kurikulum tersebut memang harus dilakukan karena kurikulum bukanlah sebuah konsep statis, akan tetapi dinamis dan harus terus menyesuaikan berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi sebagaimana prinsip kurikulum yaitu berubah dan proses terus menerus (*change and continuity*). Pemberlakuan sebuah kurikulum dalam pendidikan menengah pada dasarnya adalah suatu pembaharuan pada sistem pendidikannya. Adanya suatu pembaharuan pada sistem perubahan didasari atas perubahan tuntutan pada aspek kehidupan. Tuntutan hidup dapat berubah karena adanya perubahan pada sosial budaya masyarakat yaitu perubahan pola hidup dan perubahan sosial politik (Sanjaya, 2011). Perubahan pola hidup terjadi karena adanya perubahan pada dalam tatanan masyarakat dari yang bersifat agraris tradisional menjadi era industri modern saat ini. Menyikapi kompetensi yang dibutuhkan dalam era revolusi industri 4.0 mengharuskan siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan efisien (Suwardana, 2018).

Di tahun-tahun mendatang, kebijakan pendidikan Indonesia akan terus berkembang. Arah dan transformasi pendidikan akan banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan pemerintah yang terpilih. Era reformasi yang dimulai sejak 1998 merupakan era transisi yang salah satunya memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Undang-undang ini telah memberikan ruang terhadap perubahan-perubahan yang salah satunya adalah desentralisasi pendidikan. Perubahan ini tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah baik pusat dan daerah bagaimana persoalan wewenang tidak terjadi tumpang tindik atau bahkan menjadi sumber permasalahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Transformasi sosial yang amat cepat telah terjadi pada abad 21. Tidak hanya disebabkan karena perubahan kepemimpinan nasional, namun akibat kondisi sosial ekonomi di masyarakat, yang tidak bisa dilepaskan dari akibat disrupsi yang dipercepat oleh kondisi pandemi. Sebagai contoh, Seiring perkembangan status kedaruratan Covid-19 yang memunculkan berbagai tantangan dalam pembelajaran jarak jauh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa, namun sarat nilai-nilai penguatan karakter. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, Mendikbud pada tahun 2020 akan menerapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Dengan sistem itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam memberikan penilaian hasil belajar

siswa. Penerapan kebijakan merdeka belajar, akan membutuhkan kerjasama aktif antara peran orang tua dan sekolah. Hal yang penting dalam merdeka belajar adalah bukan mendapatkan konsep, fakta, prosedur, namun yang paling utama adalah anak-anak mendapatkan pengetahuan meta kognitif, yaitu belajar tidak hanya berupa teori namun dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Untuk itulah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar ini, penting bagi sekolah untuk menyosialisasikannya ke seluruh orang tua agar terciptanya sinergi antara pihak sekolah dan orang tua.

Pandemi yang menyebabkan siswa harus belajar secara daring, menyadarkankan betapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Pendidikan bukan hanya dilimpahkan kepada pihak sekolah, namun pihak orang tua harus ikut aktif berperan serta dalam pendampingan pendidikan anak. Walaupun saat ini siswa sudah mulai bisa sekolah secara offline, namun ke depannya peran orang tua dalam pendidikan tetap akan dibutuhkan secara aktif. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara, sekolah keluarga, dan masyarakat. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama, bagi anak. Dan dalam proses pendidikan di sekolah, tetap dibutuhkan peran orang tua. Menghadapi tantangan di dunia pendidikan di masa yang akan datang yang membutuhkan dukungan peran orang tua dan masyarakat, maka penelitian ini akan menganalisa kebijakan Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berupa hasil-hasil penelitian berupa jurnal dan disertasi yang terkait dengan penelitian ini. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Deskriptif-analisis menurut Sugiono (2009) berhubungan dengan penggambaran apa adanya atas objek yang sedang diteliti dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan tanpa dilakukan proses analisis yang kemudian disimpulkan secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pendidikan

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama dan pertama, KH Dewantara mengemukakan dengan konsep tripusat pendidikannya. Bahwa pendidikan yang dilaksanakan paling pertama adalah dalam keluarga, sejak anak lahir ke dunia orang tua yang akan menanamkan pendidikan pertama. Fungsi keluarga dalam pendidikan dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam QS At Tahrir ayat 6 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah kamu dan keluarga kamu dari siksa neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu (berhala); mereka tidak durhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka tetap melakukan segala yang diperintahkan." Maka ayat ini menunjukkan bahwa keluarga harus memberikan pendidikan sesuai syariat Allah.

Menurut Andi Hakim Nasution et. al., (2001), bahwa ahli psikologi sependapat bahwa dasar pembentukan akhlak yang baik bermula dari dalam keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak yang penuh kasih sayang dan penuh kehangatan adalah dasar pertama dari pembentukan tersebut.

Masyarakat berasal dari bahasa arab, musyarak. Sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antara entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam komunitas yang teratur (Sauri, 2019).

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menurut Sofyan Sauri (2006), bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup serta dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendidikan keluarga termasuk pendidikan luar sekolah, memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral, aturan-aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan serta sikap hidup yang bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Sebagai lingkungan pendidikan yang pertama, keluarga memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk pola kepribadian anak. Karena itu, orang tua sebagai penanggung jawab atas kehidupan keluarga harus memberikan pendidikan

dan pengajaran kepada anak-anaknya dengan menanamkan ajaran agama dan akhlak karimah (nilai) (Sauri, 2019).

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan tidak hanya oleh pihak sekolah, seperti pendidik dan tenaga kependidikan, namun keberadaan masyarakat dan orang tua peserta didik ikut mewujudkan pencapaian pendidikan yang lebih baik. Pernyataan ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh (Zaini, Zakso, & Syukri, 2014) bahwa salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan untuk memperoleh tujuan penyelenggaraan pendidikan yang baik yaitu dengan melibatkan masyarakat dan orang tua peserta didik. Hal ini diterapkan untuk memperoleh dukungan dan memberikan kesempatan bagi pihak eksternal untuk ikut berperan serta merasakan perkembangan pendidikan di daerahnya. Upaya pengadaan peran serta masyarakat atau orang tua peserta didik seperti yang dipaparkan oleh teori di atas merupakan bagian dari proses desentralisasi pendidikan (Dwiningrum, 2011). Peran masyarakat tidak hanya dilakukan dengan dukungan yang bersifat materi, namun juga pemikiran, motivasi, serta kerjasama yang terus berjalan melalui pihak komite sekolah, pemberian bahan material atau dana untuk membangun pendidikan yang diberikannya dalam forum rapat sekolah (Lukito, 2012). Pernyataan yang dipaparkan oleh Lukito tersebut memberikan gambaran mengenai peran-peran yang dapat diberikan oleh masyarakat maupun orang tua peserta didik, peran serta tersebut ditujukan untuk membangun kerjasama yang baik antar pihak untuk mencapai pendidikan yang mampu bersaing dalam perkembangan zaman. Oleh karena itu, pihak-pihak yang dimaksud, seperti guru dan orang tua peserta didik harus terjalin dengan baik untuk meningkatkan peran serta yang diharapkan (Pradhan, dkk, 2011).

Menurut (Noor, 2011) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan ekonomi, dikatakan sebagai pembangunan ekonomi karena dalam pelaksanaannya tentu melibatkan keberadaan APBD yang digunakan untuk mempermudah pengadaan kegiatan partisipasi. Teori ini memberikan pandangan bahwa peran masyarakat tidak hanya berlangsung dalam aspek permintaan atau pengadaan masyarakat saja, namun banyak hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting yang secara langsung dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dalam pembangunan kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan lain sebagainya (Mariana, 2017). Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai urusan politik karena termasuk

pada proses desentralisasi yang dijelaskan sebelumnya, pernyataan ini sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh (Magriasti, 2011) bahwa bagian desentralisasi atau pemberian tanggungjawab dalam pembangunan di setiap daerah memiliki tujuan dari berbagai segi seperti politik, manajemen pemerintahan, kemasyarakatan dan ekonomi. Keberadaan desentralisasi dalam dunia pendidikan ini dapat memberikan keluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, salah satunya adalah penyelenggaraan sekolah (Munadi, 2013). Berdasarkan pada pernyataan di atas diperoleh pemahaman bahwa keikutsertaan masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan disebut sebagai proses partisipasi (Imron, 2012). Proses partisipasi atau peran serta masyarakat dan orang tua peserta didik dalam lingkungan sekolah adalah untuk pengambilan masukan, keputusan dan pengumpulan dukungan-dukungan yang membutuhkan persiapan sehingga pembangunan nasional seperti pendidikan dapat terdorong dan meningkatkan mutu sekolah (Laksana, 2013). Pada upaya pelibatan peran serta masyarakat dan orang tua peserta didik, sekolah juga perlu untuk memperhatikan kebutuhan pihak-pihak tersebut sebagai tanggungjawab yang positif sehingga dapat menciptakan lingkungan kerjasama yang baik (Handayani, 2011). Tahapan partisipasi atau peran serta keterlibatan masyarakat dan orang tua peserta didik dapat berlangsung melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, yang mana dalam pelaksanaannya turut terlihat jenis peran serta yang diberikan yaitu dalam bentuk dukungan yang terlihat maupun tidak secara langsung seperti yang dijelaskan oleh Zaini, dkk di atas, (Hermawan & Suryono, 2016). Teori ini memberikan pemahaman bahwa semua aktivitas, kegiatan dalam bentuk program yang dibangun oleh lembaga pendidikan, termasuk mengenai keterlibatan masyarakat dan orang tua peserta didik perlu untuk direncanakan terlebih dahulu, dan pembentukan pihak-pihak internal sebagai penanggung jawab terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi peran serta atau keterlibatan masyarakat atau orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan suatu program, seperti yang dijelaskan oleh (Suroso, Hakim, & Noor, 2014) yang dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal, meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan penduduk, dan lama tinggal di suatu daerah, sedangkan untuk faktor eksternal, meliputi komunikasi dan kepemimpinan, komunikasi, dan kepemimpinan yang dimaksud apabila berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka

berhubungan dengan komunikasi yang tercipta melalui komite sekolah dengan masyarakat dan orang tua dalam membangun pendidikan melalui kerjasama yang baik.

Hasil survei nasional (Depdiknas, 1999) memberikan gambaran bahwa peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam manajemen sekolah masih sangat minim. Pada umumnya partisipasi orang tua siswa dalam manajemen sekolah lebih cenderung pada urusan non-akademik (dana, tenaga, fasilitas, dll.), terutama pada sekolah-sekolah di desa atau masyarakat yang belum maju pendidikannya.

Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anaknya Keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah maupun lengkapnya sumber daya fisik maupun sumber daya manusia, namun ditentukan pula oleh kondisi atau lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat (Depdiknas, 2007). Sekolah memerlukan cara untuk memikirkan bagaimana orang tua dalam membantu anak-anaknya dan keterlibatan masyarakat dalam sekolah. Oleh karena itu, harus dikembangkan perspektif baru, yaitu: (1) pendidikan tidak dapat sukses tanpa kolaborasi orang tua dengan masyarakat, (2) di dalam keluarga membutuhkan keteladanan yang kuat mendukung fungsional yang ada, serta (3) masyarakat harus bertanggung jawab pada semua perkembangan kebutuhan anak (Decker & Decker, 2003). Fakta lain menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, cara perlakuan orang tua terhadap anaknya sebagai salah satu cara atau bentuk partisipasi mereka dalam pendidikan dapat meningkatkan intelektual anak (Levine & Hagigust, 1988 dalam Depdiknas, 2007: 7). Pandangan dan fakta di atas memberikan makna bahwa orang tua siswa memiliki andil yang besar dalam membantu keberhasilan pendidikan anak, bahkan keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi pendidikan anak. Dengan demikian, partisipasi orang tua sangat penting artinya dalam pendidikan anak. Di dalam pendidikan progresif (Freire, 1999) menegaskan bahwa mestinya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan tidak merupakan partisipasi palsu, namun harus sampai pada keterlibatan yang terpadu dengan program kegiatan atau bahkan manajemen sekolah. Secara demokratis, masyarakat terlibat di sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini perlu, untuk dapat membantu dalam hal mendemokratisasikan kekuasaan yang ada di sekolah, untuk mengenali hak siswa dan guru, untuk mengurangi kekuatan

pribadi kepala sekolah, dan untuk menciptakan tempat-tempat kekuasaan yang baru, seperti Dewan Sekolah yang berperan dalam pengambilan keputusan dan peran konsultasi. Melalui Dewan Sekolah, orang tua dapat meraih keterlibatan dalam nasib anak-anak mereka dan keterlibatan di sekolah, dan juga dapat melahirkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah dan membuatnya aktif dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan disekolah. Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak di negara maju berbeda dengan di Negara berkembang. Di negara-negara maju, menurut Depdiknas (2007:7), sekolah dikreasikan oleh masyarakat, sehingga mutu sekolah menjadi pusat perhatian mereka dan selalu mereka upayakan untuk dipertahankan. Hal ini dapat terjadi karena mereka sudah meyakini bahwa sekolah merupakan cara terbaik dan meyakinkan untuk membina perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Mengingat keyakinan yang tinggi akan kemampuan sekolah dalam pembentukan anak-anak mereka dalam membangun masa depan yang baik tersebut membuat, mereka berpartisipasi secara aktif dan optimal mulai dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah.

Dari beberapa kajian dan analisis Depdiknas (2002) ditemukan bahwa peran serta warga sekolah khususnya guru dan peranserta masyarakat khususnya orang tua siswa masih sangat minim. Partisipasi orang tua pada umumnya cenderung bersifat fisik nonakademik, hampir semua tanggung jawab pendidikan anaknya seolah-olah menjadi tanggung jawab sekolah. Khususnya di daerah pedesaan, Made Pidarta (Depdiknas (2007) menjelaskan bahwa orang tua di daerah pedesaan yang tingkat status sosial ekonomi yang rendah hampir tidak menghiraukan sekolah dan mereka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi orang tua dalam pendidikan anaknya di sekolah, antara lain: pengetahuan orang tua, ekonomi, demografi, psikologi, wilayah, sikap guru, dan iklim sekolah. Beberapa hasil penelitian berikut, menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi orang tua dalam pendidikan anaknya. Orang tua yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang pendidikan anaknya, mereka hanya bisa merasakan namun tidak bisa melakukannya (Tharp & Gallimore, 1988 dalam Lazar & Slostad, 1999). Di sisi lain, beberapa orang tua dengan penghasilan rendah (low-income) tidak mampu melihat peran mereka untuk aktif terlibat di sekolah dan hanya percaya kepada sekolah atau guru-guru (Lareau, 1989), sedang orang tua yang lain

cenderung lebih aktif perannya di dalam proses persekolahan (Clark, 1993; Segal 1985 dalam Lazar & Slostad, 1999:208). Penelitian Wang (2008) tentang hubungan keluarga-sekolah pada orang tua China di Amerika, memberikan indikasi bahwa orang tua dari desa berbeda pola hubungannya dengan sekolah dibanding dengan orang tua yang dari kota dalam hal memperhatikan pendidikan anak. Ini berarti bahwa lingkungan masyarakat, dalam hal ini desa dan kota, mempengaruhi pola hubungan antara orang tua dengan sekolah. Melengkapi hasil penelitian Wang, Velsor & Orozco (2007:17) mampu mengidentifikasi bahwa orang tua berpenghasilan rendah mengalami hambatan dalam berpartisipasi di sekolah terkait dengan aspek demografi, psikologi, sikap guru, dan iklim sekolah.

### **B. Analisa Kebijakan Program Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Orang tua dan Masyarakat.**

Undang-undang (UU) Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 Ayat (1) mengungkapkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Adapun ayat 2 mengungkapkan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan.

Perihal keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan dinyatakan pula dalam pasal 55 ayat (1), masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat, ayat (2) penyelenggaraan pendidikan berbasis mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaan sesuai dengan standar nasional pendidikan, ayat (3), dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ayat (4), lembaga pendidikan masyarakat berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Menurut Muhammad Faiq Dzaki yang di kutip E Mulyasa dalam buku tips aplikasi manajemen sekolah, ada beberapa tingkatan peran serta

masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peran serta tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tujuh tingkatan, yang dimulai dari tingkatan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkatan tersebut terinci sebagai berikut : 1) Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis peran serta masyarakat ini adalah jenis yang paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anak kesekolah. 2) Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada peran serta masyarakat jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, dan atau tenaga. 3) Peran serta secara pasif. Artinya, menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah. (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan tersebut dengan mematuhi. 4) Peran serta melalui adanya konsultasi. Orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. 5) Peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi banding, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang dilimpahkan. Misalnya, sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingya pendidikan, masalah jender, gizi, dan lain sebagainya. Dapat juga berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah siap menampungnya, menjadi nara sumber, guru bantu, dan lain sebagainya. 7) Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan (baik akademis maupun non akademis) dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak positif terhadap upaya pembangunan pendidikan. Dengan demikian masyarakat memiliki peranan penting dalam membangun maupun meningkatkan pendidikan.

Menurut kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah dan sejalan dengan itu UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi dari keinginan era reformasi untuk menghidupkan kehidupan demokrasi. Maka Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (School Based

Management) yang memberi kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan; (2) Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (community based education) agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai community learning centre; dan (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau learner menjadi manusia yang diberdayakan. (4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System (BBE) yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera. Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan life skills yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat. Pada awal tahun 2001 digulirkan program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Program ini diyakini akan memberdayakan masyarakat pemerhati pendidikan (*stakeholders*) dalam memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, khususnya sekolah. Dalam menerapkan konsep MBS, mensyaratkan sekolah membentuk Komite Sekolah yang keanggotaannya bukan hanya orang tua siswa yang belajar di sekolah tersebut, namun mengikutsertakan pula guru, siswa, tokoh masyarakat dan pemerintahan di sekitar sekolah, dan bahkan pengusaha.

Tujuan program MBS di antaranya menuntut sekolah agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan pendidikan (quality insurance) yang disusun secara bersama-sama dengan Komite sekolah. Masyarakat dituntut perannya bukan hanya membantu pembiayaan operasional pendidikan di sekolah tersebut, melainkan membantu pula mengawasi dan mengontrol kualitas pendidikan.

Memasuki era *new normal* di mana pendidikan berbasis online menjadi hal baru dalam pelayanan pendidikan, diperlukan upaya pelibatan, orang tua dan sekolah dalam satu wadah diperkaya lagi dengan memasukkan unsur masyarakat adalah hal yang sangat diperlukan. Ketiga komponen ini disatukan dalam wadah Komite Sekolah sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan kemudian diterbitkan Permendikbud

75/2016. Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Ia menjadi ruang bagi orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah menyampaikan aspirasi dan merumuskan kebijakan bagi peningkatan pendidikan di sekolah, merupakan badan independen yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan kepala sekolah dan merupakan mitra kepala sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam memajukan sekolah Sebagai tempat mendapatkan pendidikan, sekolah dituntut dapat membentuk peserta didik selain cerdas, disiplin, tangguh, cakap dan mandiri, juga memiliki berbagai karakter bangsa sehingga dapat bersaing di dunia Internasional. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan formal memiliki visi dan misi membentuk manusia Indonesia sebagai generasi yang siap menghadapi tantangan zaman dan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik yang kelak mampu menjadi bangsa yang maju. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keberadaan Komite Sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya komunikasi yang efektif dengan pihak sekolah maupun orang tua. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng Komite Sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan serta menilai program-program sekolah. Adanya pembentukan Komite Sekolah, masyarakat akan merasa memiliki sekolah. Oleh sebab itu, peran Komite Sekolah memiliki kedudukan yang strategis dalam pengembangan sekolah dengan mengakomodasikan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan sebagai salah satu implikasi dari otonomi daerah pada umumnya dan otonomi pendidikan pada khususnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 54 UU Nomor 20/2003 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan. Namun, pada kenyataannya, kedudukan yang strategis ini tidak diikuti oleh pemahaman tentang peran dan fungsi Komite Sekolah oleh Komite Sekolah itu sendiri sehingga terkesan terdapat pemisah antara Komite Sekolah dan pengelola sekolah. Sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur tentang peran dan fungsi komite dari pemerintah pusat dan pemerintah kota sangat jarang, bahkan cenderung tidak pernah. Salah satu aspek yang paling dirasakan mendesak saat ini adalah mengefektifkan komunikasi organisasi

di sekolah dengan seluruh pemangku kepentingan. Seberapa intensif komunikasi yang dilakukan Komite Sekolah dalam mendukung pengelolaan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, Komite Sekolah memiliki kedudukan yang strategis dalam pengembangan sekolah dengan mengakomodasikan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, jika Komite Sekolah berdaya dan menjalankan tugas dan perannya dengan semestinya, maka akan tercipta sistem pendidikan ke arah masyarakat yang madani.

Pendidikan akhlak dalam keluarga, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diupayakan oleh para orang tua. Dengan harapan agar setiap anak sebagai generasi penerus, mampu memahami dan menghayati nilai-nilai akhlakul karimah. Nilai-nilai akhlakul karimah tersebut merupakan bagian inti dari ajaran Islam, dan merupakan tolak ukur dari kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang. Pendidikan akhlak yang diberikan orang tua terhadap anak sangat penting artinya dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, bertakwa kepada Allah. Karena pentingnya pendidikan akhlak tersebut, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. bersabda dalam sebuah hadits yang artinya: *"Aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak"*. Dengan demikian sangat penting bagi setiap anak untuk mempelajari, memahami dan melaksanakan nilai-nilai akhlak karimah tersebut melalui proses internalisasi nilai-nilai akhlak pada setiap individu dalam kehidupan keluarga. Orang tua sebagai pendidik utama memiliki peranan yang sangat besar dalam menanamkan dan mentransformasikan nilai-nilai akhlak karimah terhadap anak dalam keluarga.

Beberapa contoh partisipasi orang tua dalam membantu pendidikan anak di rumah (Depdiknas, 2007), yaitu : (1) mengawasi/membimbing kebiasaan anak belajar di rumah, (2) membimbing dan mendukung kegiatan akademik anak, (3) memberikan dorongan untuk meneliti, berdiskusi tentang gagasan dan atau kejadian-kejadian aktual, dan (4) mengarahkan aspirasi dan harapan akademik anak.

Untuk menggalang partisipasi orang tua, Epstein, et.al. (2009), mengidentifikasi ada enam upaya sekolah dalam melibatkan orang tua untuk berpartisipasi meningkatkan iklim sekolah dan keberhasilan siswa, yaitu: *parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision making, dan collaborating with community*. Aktivitas *communicating* adalah sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi dua arah tentang program sekolah dan kemajuan siswa. Aktivitas ini dapat meningkatkan pemahaman

dan kerjasama antara sekolah dan orang tua serta melihat kontak antara guru dan orang tua dalam rangka membantu siswa. Aktivitas volunteering untuk menggerakkan orang tua dan lainnya dapat sharing irama dan bakatnya untuk membantu aktivitas sekolah, guru, dan siswa. Aktivitas decision making mengupayakan orang tua untuk berpartisipasi dalam keputusan berkait dengan program sekolah untuk kepentingan mereka dan siswa melalui forum atau organisasi orang tua siswa. Dalam hal ini, orang tua mendapat kesempatan untuk menyampaikan ide maupun respon untuk perbaikan sekolah mereka. Dengan demikian, diharapkan keragaman orang tua maupun siswa dapat diakomodasi karena sekolah mendapatkan informasi, harapan, gagasan, atau tanggapan orang tua terhadap pendidikan anaknya di sekolah. Kegiatan collaborating with the community dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antara sekolah, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi, agen-agen, individu-individu. Kerja sama ini dapat berupa sumber daya masyarakat membantu sekolah, siswa, dan keluarga atau pendidik, siswa, dan keluarga membantu masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil makna bahwa partisipasi orang tua dan keluarga di sekolah sangat penting dan berpengaruh pada keberhasilan pendidikan anak, karena keluarga merupakan pemberi sosialisasi pertama dan utama bagi anak. Beberapa keuntungan partisipasi orang tua dan keluarga di sekolah bagi anak memberi sikap positif terhadap belajar, prestasi akademik lebih tinggi, dan aspirasi yang lebih tinggi. Secara umum, dari keenam kegiatan penggalangan partisipasi orang tua tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe partisipasi, yaitu : (1) partisipasi berupa pemberian bantuan yang bersifat fisik, fasilitas pendidikan, maupun pendanaan, yang dapat dikategorikan ke dalam partisipasi structural, (2) partisipasi berupa non fisik yang biasanya untuk mendukung proses akademik anak, seperti pemberian motivasi, kesadaran jam belajar, yang dapat dikategorikan ke dalam partisipasi dinamis. Partisipasi yang bersifat dinamis dapat mudah diperankan oleh semua orang tua, meskipun intensitas dan efektivitasnya berbeda-beda. Di sisi lain, partisipasi yang bersifat struktural tidak mesti semua orang tua dapat melakukannya, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orang tua.

Sekarang hampir semua sekolah memiliki komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah. Namun dukungan yang saat ini diberikan lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membangun gedung, fasilitas sekolah dan lain-lain. Maka kedepannya peran

masyarakat harus banyak didorong dalam berbagai kegiatan lain bahkan yang bersifat teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi lain, guru pengganti, mengajar kebudayaan atau keterampilan, untuk meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh kepala sekolah dan guru-guru untuk menggalang partisipasi masyarakat, yaitu: 1) Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpindahan, peringatan hari besar nasional, keagamaan, dan pentas seni. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan sekolah. 2) Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut yang pertama kali harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi, dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh-tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figur masyarakat (Kiai), olahragawan, seniman, informal leaders, psikolog, dokter, dan pengusaha. 3) Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai kegiatan sekolah sesuai dengan minatnya. Misalnya olahragawan dapat dilibatkan dalam pembinaan olah raga di sekolah, dokter dapat dilibatkan dalam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), atau Palang Merah Remaja (PMR), psikolog dapat dilibatkan dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Tokoh masyarakat tersebut dijadikan mediator dengan masyarakat pada umumnya. 4) Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Misalnya awal pelibatan olahragawan dikaitkan dengan kegiatan PORDA, ketika minat masyarakat terhadap olahraga sedang meningkat, awal pelibatan dokter dimulai pada hari Kesehatan Nasional, atau pada saat kegiatan pemeriksaan kesehatan warga di sekolah. Mengingat bahwa salah satu kunci sukses menggalang partisipasi masyarakat adalah menjalin hubungan yang harmonis, antara masyarakat, orang tua dan sekolah sehingga tanggung jawab bersama antara masyarakat, orang tua dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama

Pendidikan nilai merupakan inti dalam pendidikan agama Islam, karena tujuan dari pendidikan adalah mendidik perilaku manusia yang didalam ajaran Islam dikenal dengan mendidik akhlak mulia yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Pendidikan nilai dalam Ajaran Agama Islam berperan penting dalam upaya mewujudkan manusia yang utuh

atau insan kamil. Tantangan pendidikan Islam khususnya di negara Indonesia adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik secara utuh dan kaffah yang tidak saja menguasai pengetahuan, akan tetapi mempunyai kualitas iman, dan akhlak mulia. (Frimayanti, 2017).

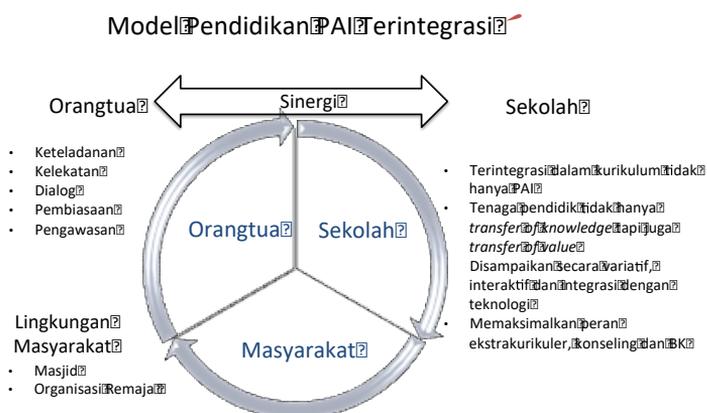
Kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat dewasa ini tidak lepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat secara keseluruhan. Efektivitas paradigm pendidikan moral yang berlangsung pada jenjang pendidikan formal di sekolah saat ini bukan merupakan sarana utama transfer nilai-nilai moral. Pendidikan moral di sekolah baru menyentuh aspek kognitif, belum menyentuh aspek edukasi dan implementasi. Tidaklah heran manakala beberapa pengamat sosial menyatakan bahwa kunci keberhasilan pendidikan moral terletak pada peran keluarga dan masyarakat sekitar (Sauri 2019).

Ratna Megawangi (2004) berpendapat bahwa pembentukan karakter perlu dilakukan secara menyeluruh. Keluarga pada masyarakat yang kompleks terkadang kurang efektif mendidik karakter kepada anak-anaknya, sehingga perlu dibantu dengan pendidikan karakter di sekolah. Selain itu, perlu adanya usaha lain di masyarakat.

Keberhasilan pendidikan karakter membutuhkan dukungan sinergitas antara institusi pendidikan informal dan formal. Mengutip pendapat Hunter, bahwa karakter selalu terkait konteks sosial. Karakter dibentuk dari akumulasi rentang pengalaman dan interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Senada dengan itu, Lickona (2013) mengungkapkan bahwa sinergi orang tua, guru, Tenaga kependidikan, dan kepala sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik mutlak diperlukan. Hanya dengan demikian, akan terbentuk iklim atau atmosfer sekolah yang kondusif bagi persemaian nilai luhur yang disepakati (Hunter, 2000). Sementara Creasey mengatakan, *the Students will find the transistion between home and school to be much easier if the same values and morals taught at school are also echoed at home, and vice versa* (Creasy, 2008).

Pendidikan karakter berawal dari institusi pendidikan informal dalam pendidikan keluarga, melalui pemeliharaan, kasih sayang, pembiasaan, dan pemberian makanan yang dikonsumsi. Bila anak memasuki usia tamyiz (mulai bisa membedakan sesuatu), maka mulai diberi pengertian dan pembiasaan yang baik, yang dianjurkan oleh Al-Ghazali melalui metode cerita (qisah-hikayat), dan keteladanan (uswatun hasanah).

Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan karakter pada anak-anaknya, maka sulit bagi institusi sekolah untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak dirumah. Di sisi lain, orang tua perlu mengawasi pergaulan anak, karena pergaulan memiliki andil sangat besar dalam pembentukan kepribadian anak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, *"seseorang tergantung temannya, maka hendaklah kalian melihat dengan siapa ia berteman."* (HR Abu Dawud dan Tirmidzi). Dalam implementasinya, pendidikan karakter tidak bisa lepas dari agama. Pendekatan setting belajar secara holistic secara afektif dan psikomotorik dalam kehidupan keseharian di rumah, masjid dan lingkungan sekolah, akan mampu menutup kesenjangan kurikulum yang dikembangkan di sekolah.



Gambar 1. Model Pendidikan Terintegrasi Sekolah, Orang tua dan Masyarakat

Dihadapkan pada tantangan dunia pendidikan di masa yang akan datang, pihak sekolah dan pembuat kebijakan berperan aktif dalam meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Agar tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat dalam dunia pendidikan. Sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai, dalam mencetak manusia indonesia yang tidak hanya cerdas namun beriman bertakwa dan berakhlak mulia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Peran serta masyarakat dalam pendidikan sudah dituangkan dalam kebijakan pemerintah baik dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem

pendidikan Nasional, UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah dan sejalan dengan itu UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menggulirkan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan kemudian diterbitkan Permendikbud 75/2016.

Namun dalam implementasinya, partisipasi orang tua dan masyarakat masih minim hanya pada urusan non akademik dana, tenaga, fasilitas sehingga diperlukan upaya pada tataran implementasi untuk meningkatkan peran orang tua dan masyarakat. Sekolah diharapkan mampu menggali dan mengelola semua jenis partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program sekolah sesuai dengan kebutuhan berupa partisipasi ide, tenaga, dana, keterampilan maupun partisipasi sosial. Sekolah merupakan bagian integral dari masyarakat sekitarnya, berkewajiban memberikan pelayanan atas pendidikan yang berkualitas, dan berperan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendidikan. Sekolah diharapkan mampu menggali dan mengelola semua jenis partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program sekolah sesuai dengan kebutuhan berupa partisipasi ide, tenaga, dana, keterampilan maupun partisipasi sosial.

Peran serta orang tua dan masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah diwujudkan dalam Manajemen Berbasis Sekolah untuk fokus pada hal-hal : (1) membangun sikap kepemilikan sekolah, (2) merumuskan kebijakan sekolah, (3) membangun kesadaran mutu, (4) perhatian terhadap kehidupan akademik, dan (5) membangun tata kerja kelembagaan sekolah. Lebih khusus ditekankan bahwa komite sekolah bertujuan untuk (1) mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Terkait dengan tujuan pendidikan nasional dan khususnya tujuan pendidikan Islam yang menekankan pada terbentuknya karakter peserta

didik yang berakhlak mulia, maka kemerosotan moral yang saat ini terjadi di masyarakat, membutuhkan perhatian utama dari penyelenggara pendidikan. Dan khususnya dalam pendidikan nilai, tidak bisa dilepaskan pentingnya kontribusi peran orang tua dan masyarakat untuk bersinergi dengan pihak sekolah dan menyukseskan pendidikan karakter. Peran Pendidikan nilai di sekolah harus mengolaborasikan semua muatan kurikulum nilai tanpa dikotomi untuk anak secara utuh dan menyeluruh dalam setiap pelajaran. Dan dibutuhkan komunikasi yang baik dengan orang tua untuk bisa bekerjasama dan sejalan dalam pendidikan nilai pada keluarga ke arah yang lebih akrab, mencerdaskan dan menyenangkan untuk anak. Pendidikan nilai dalam masyarakat memberikan pemahaman kepada anak akan implementasi pendidikan nilai di masyarakat. Sekolah, keluarga dan masyarakat harus menyadari tanggung jawab dan bekerjasama sesuai perannya dalam pendidikan nilai. Untuk itu, diperlukan tujuan yang selaras, dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abuddin Nata. (2004). *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Decker, L.E. & Decker, V.A. (2003). *Home, school, and community partnerships*. Lan-ham: The Scarecrow Press, Inc.
- Depdiknas. (2002). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah: Konsep dasar*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Pendidikan dan pelatihan: Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Ditnaga Ditjen PMPTK.
- Depdiknas RI. (2003). *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat PLP

- Epstein, et.al. (2009). *School, Family, And Community Partnerships: Your Handbook For Action*. Third edition. A Sage Company: Corwin Press.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E.. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung:PT CV Pustaka Setia
- Frimayanti, Ade Imelda. (2017). Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8
- Hadiyanto. (2005). Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imron, Ali. (1995). *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lukito, R. (2012). *Manajemen Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Disertasi tidak diterbitkan. Universitas Negeri Malang, Malang.
- Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. *Jurnal Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah. LAB-ANE FISIF Untirta*, Vol. 1, (No. 1), pp. 252-258.
- David Easton. 1(1). *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*: <http://www.academia.edu/download/31087489/48-90-1-SM.pdf>
- Moleong, L. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2007). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, Dan Perguruan Tinggi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

- Pakniany, Nova Suci Lestari, Ali Imron, I Nyoman Sudana Degeng. 2020. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Volume: 5 Nomor: 3 Bulan Maret Tahun 2020
- Ramayulis. (2002). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasyidi, Sukarno, dan Minna El Widdah. (2021). Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia, *Jurnal Literasiologi*, Juli 2021.
- Rozak, Abdul. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Alim, Islamic Education*, Vol 3, 2021
- Sauri, Sofyan.(2002). *Model Manajemen Pendidikan Nilai Berbasis Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*. Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI.
- Sauri, Sofyan, dan Diding Nurdin (2019). *Manajemen Pendidikan Berbasis Nilai*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sanjaya, Ades. (2011). *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwardana, Hendra. (2018). Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental. *JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri*. 1(2), 109-118.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
- Zaini, A., Zakso, A., & Syukri, M. (2014). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(11), 1-13.